



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 659/DJU/SK/HM.02.3/4/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2020**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP);
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2020**

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara terdiri atas Kesekretariatan, Divisi Kajian dan Divisi Teknis Aplikasi.

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara mempunyai tugas:

1. Kesekretariatan ...

1. Kesekretariatan:
 - a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sistem Informasi Perkara (SATGAS SIPP);
 - b. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
 - c. Menghimpun *review* atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 - d. Melakukan publikasi terhadap *Frequently Asked Question (FAQ)* pada media yang telah ditentukan;
 - e. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
2. Divisi Kajian:
 - a. Melakukan *review* atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 - b. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
 - c. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 - d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 - e. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Divisi Teknis Aplikasi:
 - a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Tingkat Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;

b. Menindaklanjuti ...

- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- e. Membuat dan mengembangkan tools/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk mendukung register elektronik;
- f. Melakukan Koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda;
8. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Batang, Yogyakarta, Madiun, Mungkid, Sumber, Sei Rampah, Stabat, Jambi, Sekayu, Kayu Agung, Praya, Oelamasi, Bengkayang, Martapura, Bontang, Maros, Sungguminasa, dan Dataran Hunipopu;
9. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 NOMOR : 659/DJU/SK/HM02.3/4/2020
 TANGGAL : 29 April 2020

DAFTAR NAMA
SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
(SATGAS SIPP)

NO.	N A M A	JABATAN	POSISI DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Dr. H. Prim Haryadi, SH., MH.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembina
2.	Zahlisa Vitalita, SH.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Ketua Satgas
3.	Lies Khadijah, SH., MH.	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring	Sekretaris Satgas
KESEKRETARIATAN			
4.	Yayat Sudrajat, SH., MH.	Kasubdit Statistik dan Dokumentasi	Koordinator
5.	Leni Cahyani, SH., MH.	Kepala Seksi Sarana Pengadilan	Anggota
6.	Misra Dewita, S.H., M.H	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
7.	Rosalia Puspa K, SE., MH.	Kepala Seksi Tata Persidangan	Anggota
8.	Reni Kartini, S.H	Staf Seksi Pelayanan Peradilan	Anggota
9.	Marthinalova Noll, S.Kom	Staf Seksi Statistik	Anggota
10.	Safitri, A.Md.	Staf Seksi Sarana Kerja Pengadilan	Anggota
DIVISI KAJIAN			
11.	Heru Pramono, SH., MH.	Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura	Koordinator
12.	James Butar Butar, SH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta	Anggota
13.	Agoeng Rahardjo, SH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung	Anggota

14.	Saurasi Silalahi, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya	Anggota
15.	Tony Pribadi, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Anggota
16.	Sirande Palayukan, SH., M.Hum	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta	Anggota
17.	Eka Budhi Prijanta, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar	Anggota
18.	Harini, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota
19.	Eko Aryanto, SH., MH.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Anggota
20.	Rizkiansyah, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Sekayu	Anggota
21.	Mustamin, SH., MH.	Hakim Pengadilan Negeri Maros	Anggota
22.	Zulfikar Berlian, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung	Anggota
23.	Ferdian Permadi, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah	Anggota
24.	Dirgha Zaki Azizul, SH., MH.	Hakim Pengadilan Negeri Batang	Anggota
25.	H. Adi Wahyono, SH., MH.	Panitera Pengadilan Tinggi Jambi	Anggota
26.	Candra S.H.	Kasubdit Tata Kelola	Anggota
27.	Achmad Basyari, SE.	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	Anggota
DIVISI TEKNIS APLIKASI			
31.	Jhon Hendriansyah, SH.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi	Koordinator
32.	Marisa Eka Putra, ST., M.Eng	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang	Anggota
33.	Dona Panambayan, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Martapura	Anggota
34.	Ita Masyita, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bontang	Anggota
35.	Fransesco Palang Ama, ST.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	Anggota
36.	Yenny Viky Effendy, ST., M.Eng	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Yogyakarta	Anggota

37.	Imam Maxudi, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Praya	Anggota
38.	Aris Susilo, ST.	Pranata Komputer Ahli Muda Pengadilan Negeri Madiun	Anggota
39.	Zeno Dani Kuncoro, ST.	Pranata Komputer Ahli Muda Pengadilan Tinggi Bengkulu	Anggota
40.	Oktein Josepus Susak, SH., MH.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi	Anggota
41.	Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom	Kepala Seksi Statistik	Anggota
42.	Aditya Widyartadi, S.Kom	Staf Seksi Tata Persidangan	Anggota
43.	Oktaviandi Wahyu Nugroho, ST.	Staf Seksi Statistik	Anggota
44.	Bambang Andi Saputra, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa	Anggota
45.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Dit. PAPU	Anggota
46.	Raja Muda Arief, S. Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Stabat	Anggota
47.	Agustinus Evan Bangun M., S.Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Mungkid	Anggota
48.	Yusrani	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Sumber	Anggota



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARIYADI